

212

PEMBINAAN POLRI DAN LINGKUNGAN KERJANYA

(Kajian Ekologi terhadap Pembangunan Polri
renungan dalam rangka memperingati

50 Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Oleh Drs. Teguh Soedarsono, S.H., M.Si. *)

1. Pendahuluan

a. Banyak cara dilakukan orang untuk memperingati sesuatu, antara lain dilakukan dengan membuat renungan tentang suatu makna dan atau aspek dari hal yang diperingati tersebut. Sehubungan hal ini sebagai warga negara Polri melalui disiplin ilmunya dan prediksi serta antisipasinya terhadap tantangan tugas Polri berusaha untuk mengkaji dan memberikan masukan terhadap upaya pembinaan Polri.

Pisau analisis dalam kajian ini digunakan pendekatan *Ekologi* yang secara berturut tertuju pada materi pembinaan tugas, kemampuan sumberdaya personil, dan kapasitas kelembagaan kerja Polri.

b. Materi ini dikaji berdasarkan alasan :

1). *Alasan ilmiah* yang mendorong setiap warga Polri untuk mau memperbaiki komunitas kerja Polri dengan menggunakan ilmu dan disiplin yang ditekuni dan atau dikuasainya ;

2). *Alasan kebutuhan* yang mend-

orong setiap insan Polri untuk selalu berusaha meningkatkan eksistensi dan keberhasi-
lilan Polri dalam peran, fungsi, tugas, dan keberadaannya ;

3). *Alasan etis* yang mendorong setiap warga masyarakat untuk ikut bertanggungjawab terhadap kelangsungan dan keamanan pelaksanaan tugas kepolisian dalam kehidupan sosialnya ;

4). *Alasan andalan* yang mendorong setiap warga-negara Indonesia untuk ikut menjaga kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan nasionalnya, khususnya dalam rangka menghadapi berbagai tantangan, keterbatasan, kendala dan konflik sosial yang dihadapinya.

c. Topik kajian **Pembinaan Polri dan Lingkungan Kerjanya** ini tidak berpretensi bahwa pembinaan Polri selama ini belum dilakukan secara mendasar, menyeluruh, dan integral, namun dalam kajian ekologi ini akan diungkapkan dan diingatkan kembali kepada kita semua tentang berbagai hal yang harus diantisipasi dalam pembinaan dan pembangunan Polri yang kita cintai ini secara berlanjut dan berkesinambungan.

*) Penulis adalah Kolonel Polisi, bertugas pada Bapedal, Jakarta.

Materi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran dalam pembinaan Polri, khususnya sehubungan peran dan tugas Polri sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, maupun sebagai aparat penegak hukum.

2. Kajian Ekologi sebagai pisau analisis

Sebelum membahas topik masalahnya, terlebih dahulu perlu diketahui tentang pisau analisis yang digunakan dalam kajiannya, yaitu pendekatan atau disiplin Ekologi. Dalam hal ini secara singkat dijelaskan, bahwa :

a. Kajian ekologi untuk pertama kali diperkenalkan oleh *Ernst Haeckel* pada tahun 1869 sebagai suatu studi atau telaahan mengenai rumah atau tempat tinggal, namun selanjutnya pendekatan atau disiplin ini dipelajari sebagai ilmu untuk mempelajari hubungan timbal balik kehidupan sosial antar makhluk hidup dan dengan lingkungannya.

b. Ekologi berkembang pesat sebagai ilmu sejak tahun 1980-an, karena cakupan materinya yang sangat luas maka untuk tuntutan praktisnya dikelompokkan ke dalam beberapa bidang kajian, yaitu *autekologi*, *sine-kologi*, *ekologi habitat*, dan *bio-ekologi*.

Namun pada intinya seluruh aspek pendekatan ekologi merupakan suatu studi mengenai interaksi vital dan spasial dari kehidupan organisme da-

lam lingkungannya, sehingga prioritas kajiannya selalu akan mengarah kepada proses survival dan eksistensi dari unsur ekosistem dalam lingkungannya.

c. Kajian ekologi pada mulanya dilakukan terhadap proses atau hukum alam seperti fertilitas, mortalitas, suksesi atau reproduksi, dan adaptasi sosial, namun untuk selanjutnya ditunjukkan juga untuk mengkaji berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat sesuai akal dan budaya manusia.

d. Syarat utama dalam membahas suatu materi dengan menggunakan pendekatan ekologi harus dilakukan secara idealis, holistik, dan tidak memisahkan berbagai prinsip dasar kehidupan dalam ekosistemnya (Dinyatakan oleh Odum (1971), Southwich (1976), dan Miller Jr. (1979), bahwa Konsep ekosistem merupakan salah satu pendekatan studi ekologi).

Berbagai aspek kehidupan yang memberikan peran untuk mewujudkan keseimbangan, kestabilan, dan kelangsungan hidup dalam keberadaannya harus dapat ditelaah secara faktual.

e. *Ekologi manusia* merupakan satu unsur kajian ekologi yang objek kajiannya tertuju pada kehidupan manusia, sehingga kajian objektif dan netralnya dilandasi pada hakekat dan aturan praktis yang mempengaruhi perilaku dalam kehidupan indi-

vidu atau kelompok manusia yang menjadi objek kajiannya.

Setiap perilaku dan tindakan manusia akan mempengaruhi kelangsungan, kestabilan, dan keseimbangan dari ekosistemnya, karena manusia dalam keberadaan dan upayanya untuk memenuhi setiap tuntutan dan kebutuhan hidupnya akan selalu dilakukan melalui interaksi sosial dengan unsur-unsur ekosistem dan lingkungan hidupnya.

f. Manusia dalam setiap keberadaannya akan selalu melakukan adaptasi sosial, baik yang dilakukan untuk survive, eksistensi maupun berkenaan dengan proses degradasinya. Setiap keberhasilan dalam proses adaptasi sosialnya akan memberikan kemampuan di dalam menghadapi dan menjalankan tata kehidupan lingkungannya, karena proses adaptasi tersebut diwujudkan dalam bentuk pola perilaku hidup, maupun sarana dan mata pencaharian yang ditekuninya sesuai beban fisik dan psikis yang diterima dari ekosistem dan lingkungan hidupnya.

3. Kajian terhadap pembinaan kemampuan tugas Polri secara umum

Kajian ekologi terhadap Polri merupakan kajian ekologi manusia terhadap keberadaan lembaga publik pelaksana peran dan tugas kepolisian di dalam ekosistem dan atau tata kehidupan sosial masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Kajian yang dilakukan selain harus didasarkan

pada norma dan informasi yang menyangkut disiplin, moral, dan etika kerjanya, juga memperhatikan tata nilai, falsafah serta etika moral kerja yang harus dipatuhinya. (Dinyatakan oleh Ibn. Khaldun, 1406 REL Faris 1964 OD Duncan 1976 bahwa Prinsip kerja dari suatu organisasi didasarkan pada suatu nilai acuan yang diyakininya).

Ekosistem pelaksanaan tugas lembaga publik meliputi berbagai unsur yang terkait dalam cita-cita perjuangan dan sejarah kehidupan bangsanya, serta berada dalam tatanan yang mendasarkan pada norma dan piranti penuntun tugasnya, sehingga kajian ekologinya harus memperhatikan keadaan, kondisi, dan berbagai ketentuan yang mempengaruhi dalam keberadaan dan kelangsungan tugasnya.

Berbagai norma, kondisi, dan keadaan yang dapat dijadikan acuan dasar dalam kajian ini, adalah :

a. **Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia** yang secara fakta menyatakan Polri sebagai komponen pejuang bangsa, sehingga keberadaan maupun kiprah Polri dituntut untuk dapat menyesuaikan dan mengarah kepada tuntutan perjuangan bangsanya. Penampilan, strategi dan pola pikir serta pola tindakan Polri harus merupakan bagian integral dari pembangunan nasionalnya, dan di sisi lain pembangunan dan pembinaan Polri harus dilandasi dengan komitmen dan ketegasan segenap

pihak sehubungan dengan keberadaan, kelangsungan, maupun pelaksanaan peran dan tugas Polri.

b. Tekad hidup dari induk organisasinya yang ditampilkan dari norma dan atau doktrin perjuangannya, yang dalam hal ini dapat dinyatakan antara lain pada Doktrin *Catur Dharma Eka Karma*. Doktrin tersebut menyatakan bahwa keberadaan Polri sebagai unsur ABRI berkewajiban melaksanakan tugas pembinaan bala Kamtibmas dan sebagai unsur penegakan hukum bertugas untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Peran dan tugas tersebut hanya dapat dilaksanakan dan berhasil untuk diwujudkan, bila berbagai kondisi kehidupan politik, ekonomi maupun sosial budaya di lingkungannya mampu memberikan suasana kondusif bagi peran, tugas, dan kelangsungan dari keberadaannya.

c. Cakrawala pandang kehidupan masyarakat lingkungannya, antara lain terhadap perjuangan dan atau pembangunan nasionalnya. Dalam hal ini tersirat dalam tinjauan *Wawasan Nusantara* dan *Ketahanan Nasional*, karena dari kedua cakrawala pandang tersebut tersirat makna keberadaan Polri sebagai unsur pelaku pembangunan yang selain dituntut untuk mampu menjadi komponen ABRI yang bertugas di bidang pertahanan dan keamanan, juga berkewajiban untuk berperan di bidang pembangunan sosial dan

politik. Keadaan ini menuntut Polri untuk berkemampuan ikut memberikan konsep perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan nasional, sehingga dalam hal ini Polri harus berupaya membangun dan membina semua potensinya agar mampu menjemput berbagai tantangan tugas di bidang-bidang tugas tersebut dalam batas teritorial, administrasi, geografis, maupun ekologiannya.

d. Etika, tata nilai, dan moral kehidupannya, yang dalam hal ini antara lain dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1990. Dalam norma hukum tersebut dinyatakan keberadaan Polri selain harus mampu mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban umum dengan cara memelihara dan meningkatkan tertib hukum serta membina ketentraman kehidupan masyarakatnya, juga dituntut untuk mampu bertindak sebagai pengayom masyarakat yang diwujudkan dalam kemampuannya memberikan perlindungan, pelayanan dan bimbingan kepada masyarakatnya. Kewajiban tersebut secara faktual merupakan dua bidang tugas yang bersifat antagonis, namun dalam konsep pikir dan pola tindaknya dituntut untuk dapat ditampilkan ke dalam suatu pelaksanaan kerja dan karya yang saling mendukung.

e. Konsepsi strategis pembangunan

nasionalnya, yang dalam hal ini dapat diketahui dalam *Garis-garis Besar Haluan Negara* (GBHN). GBHN 1993-1998 menyatakan bahwa pembangunan Polri sebagai inti kekuatan matra Kamtibmas dan alat negara penegak hukum diarahkan agar mampu mewujudkan tertib hukum dan ketentraman di lingkungan masyarakatnya. Amanat pembangunan ini menyiratkan adanya harapan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia untuk mempunyai kemampuan bagi Polri yang dapat disesuaikan dengan kemajuan jaman, peningkatan ilmu dan teknologi, serta tuntutan perkembangan kehidupan sosial masyarakatnya.

Dari cita-cita dan politik hukum tersebut di atas, maka pembinaan dan pembangunan Polri secara nyata harus diarahkan pada :

- a. Proses, lingkup, dan arah kehidupan masyarakatnya yang meliputi perubahan dan perkembangan kehidupan sosial masyarakatnya, dampak dari siklus sosial dan sukse-sesi dalam lingkungan pemerintahan yang sedang terjadi, perubahan tata nilai, kebutuhan hidup, serta gejolak sosial yang menjadi trend kehidupan sosial masyarakatnya, sehingga setiap aspek perubahan dalam ekosistem kerja Polri dapat dijawab dengan kesiapan fisik, sarana, dan kemampuan tugas yang disesuaikan dengan kondisi masalah, sasaran, maupun target layanan operasionalnya.
- b. Tatanan, struktur, dan nilai kehidupan sosial masyarakatnya, yang ditampakkan dalam cara dan pola kehidupan, daya interaksi sosial, maupun ragam mata pencaharian yang ditekuni oleh sebagian besar masyarakatnya, sehingga dari keadaan itu dapat ditentukan sikap dan konsensus kerja Polri dalam peran dan tugasnya, selain itu juga dapat dikenali unsur dan struktur masyarakatnya yang menjadi penentu atau pendorong, dan atau penghalang dalam pelaksanaan peran dan tugas Polri. (Dinyatakan oleh Pianka, 1967 bahwa, Salah satu cara untuk meraih sukses adalah dengan cara mendasarkan sasaran dan target kerja pada masalah dan tuntutan kebutuhan dari objek layanannya, sehingga pembinaan organisasi tidak hanya tertuju untuk peningkatan kemampuan organisasi tetapi juga untuk penyiapan kondisi yang memungkinkan terlaksananya peran dan tugasnya).
- c. Perkembangan tingkat pengetahuan dan budaya masyarakatnya, karena dari gejolak dan dinamikanya secara integral dapat menjadi unsur pemicu evolusi dalam pelaksanaan peran dan tugas Polri, sehingga aspek kehidupan politik, ekonomi, dan teknologi harus dapat dikenali dan menjadi pola integrasi dan orientasi dalam pembinaan Polri.
- d. Keberadaan dan konsentrasi sumberdaya lingkungannya serta arah peta politik kehidupan sosial

masyarakatnya, karena dengan mengetahui hal tersebut dapat diketahui animo dan harapan masyarakat terhadap keberadaan Polri, sehingga dapat ditentukan arah, wujud, dan tingkat pembinaan Polri sesuai kebutuhannya. (Dinyatakan oleh Whitaker, 1967 bahwa, Keseluruhan perubahan keadaan yang terjadi secara bersamaan dalam suatu komunitas objek, akan memberikan perhatian dalam penataan komposisi, fungsi dan cara kerjanya masing-masing unsur yang terlibat).

4. Kajian terhadap Pembinaan Sumberdaya manusia Polri

Untuk pembinaan sumberdaya manusia dengan pendekatan ekologi, terlebih dahulu dikenalkan beberapa prinsip pokok kehidupan manusia dalam pola interaksinya sehubungan dengan upayanya untuk survive dan atau eksis dalam ekosistem kehidupan masyarakatnya, yaitu antara lain :

a. Dalam interaksi manusia selalu terkandung prinsip hubungan yang bersifat timbal balik, saling keterkaitan dan saling ketergantungan dengan sesama dan lingkungan hidupnya, baik dalam hubungannya yang bersifat *imanen dan inklusif* maupun *transenden dan eksklusif* terhadap lingkungannya, sehingga pembinaan manusia harus dapat dilakukan secara komprehensif, sistematis, holistik, dan antroposentris ;

b. Prinsip pokok mencari ke-

seimbangan selalu dilakukan manusia dalam menghadapi setiap perubahan kelimpahan dan atau pendistribusian sumberdaya dalam ekosistem lingkungannya. Hal ini biasa dilakukan dalam situasi lokal, temporal, maupun berlanjut, karena pada setiap perubahan memerlukan adaptasi sosial dan atau produktivitas dari unsur-unsur yang bersangkutan.

Untuk membina perilaku dan atau kemampuan dalam suatu masa transisi harus diperhatikan kondisi dan situasi perubahan yang terjadi dalam habitat, populasi, komunitas, maupun *niche*-nya, karena berbagai proses evolusi yang terjadi akan mempengaruhi dalam penentuan bentuk, corak dan arah pembinaan unsur-unsurnya ;

c. Prinsip pokok untuk mengadakan *survival for the fittes* dalam setiap menghadapi gangguan yang menyangkut tuntutan kebutuhan hidup maupun sumber kehidupannya, sehingga kebijakan pembinaan sumberdaya manusia yang menyangkut perawatan, reproduksi, maupun penyediaan kemampuan harus dilakukan dengan menggunakan kreativitas dan aktivitas yang tinggi;

d. Prinsip pokok untuk menciptakan *harmonisasi* dalam proses interaksi sosialisasinya, baik dalam bentuk *simbiose* ataupun *antagonis*, karena dari wujud dan pola interaksinya dapat dikenali tatanan perilaku masyarakatnya dalam situasi tersebut. Untuk melakukan pembinaan

sikap, perilaku, dan kemampuan sumberdaya manusia perlu diselaraskan dengan kebutuhannya dalam proses eksistensi, maupun degradasi dan atau destruksinya ;

e. Prinsip pokok dalam melakukan adaptasi sosial terhadap situasi dan kondisi lingkungannya, yang diwujudkan dalam bentuk daya motivasi, sikap dan perilaku, aspirasi, dan atau persepsinya untuk membina dan membentuk kemampuan guna menunjang keberadaannya. Kegagalan dalam melakukan adaptasi sosial selain akan menimbulkan sikap anti-pati dari pihak lain, juga dapat menjadi benih atau sumber konflik ;

f. Prinsip pokok dalam membentuk kelangsungan hidupnya sehubungan dengan kelangkaan momentum, keterbatasan sumberdaya, dan atau kemampuan daya dukung lingkungannya, sehingga pembinaan sumberdaya manusia harus didasarkan pada keterbatasan sarana, waktu dan ruang geraknya.

Mengacu berbagai prinsip ekologi dalam pembinaan sumberdaya manusia tersebut di atas, maka untuk pembinaan sumberdaya personil Polri harus memperhatikan pada :

a. Aspek kebutuhan, tuntutan kemampuan, serta daya kreativitas dan aktivitas para pengelolanya dalam pembentukan, pendayagunaan, dan dekomposisi sumberdaya personil Polri. Pembinaan sumberdaya personil Polri selain harus didasarkan pada target pemenuhan hasil kerja dan optimasi tuntutan

operasionalnya, juga harus memperhatikan tuntutan kebutuhan (*leisure*) sehubungan proses produktivitas, kelangsungan, eksistensi, maupun degradasinya yang sedang berlangsung. (Dinyatakan Harbison dan Myers, 1964 bahwa, Pembinaan sumberdaya manusia mempunyai arti berbagai upaya guna meningkatkan ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan sesuai kebutuhan lingkungannya).

b. Aspek keterbatasan dan kelimpahan sumberdaya dalam penyiapan kader dan pemanfaatan sumberdaya personil Polri tidak hanya berharap dari proses evolusi dan suksesi alami yang terjadi, tetapi harus memperhatikan kebutuhan dan tuntutan sehubungan proses adaptasi sosial, kelangkaan momentum, dan atau situasi konflik ;

c. Aspek tuntutan kuantitas, kualitas, komposisi, dinamika, dan struktur angkatan kerja dan kelembagaannya dalam proses produksi, dekomposisi, maupun pen-dayagunaannya.

d. Aspek kurva permintaan personilnya yang dibutuhkan untuk keseimbangan dan kelangsungan komunitasnya, keterbatasan kemampuan, kelangkaan momentum dalam pengadaan sarana, karena dengan mengetahui kurva permintaan personil pada setiap sektor dan kurun waktunya akan dapat ditentukan kuantitas dan kualitas kemampuan personil yang dikehendaki dan dapat diciptakan suasana kompetitif

dalam pelaksanaan tugas, perawatan personil, maupun pengendalian kariernya ;

e. Aspek bentuk balas jasa atau kompensasi yang pantas yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan, fasilitas, maupun pengadaan kelengkapan prasarana dan sarana guna meningkatkan kemampuan, mutu kerja, dan atau kehidupan personil yang bersangkutan ;

f. Aspek pembinaan generasi muda Polri harus diarahkan pada upaya untuk mendapatkan kader pekerja Polri yang berkemampuan generalis humanistik dan bukan yang berkemampuan *generalis humanistik* dan bukan yang berkemampuan *teknopragmatis*, karena pembinaan personil Polri tidak membentuk insan-insan mampu bekerja dan berkelakuan seperti robot yang kering dengan daya kreatif.

5. Kajian terhadap Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Polri

Upaya peningkatan kemampuan dan atau kapasitas kelembagaan Polri harus selalu mendasarkan pada tujuan ideal pembentukannya, sehingga dalam pembinaan kelembagaan Polri diarahkan pada :

a. *Work design, method design, dan systems planningnya*, di samping piranti dan atau lembaga pengawasan yang mampu mendinamisir suasana kerja, demokratisasi, kreatifitas, maupun kompetisi positifnya ;

b. Unit kerja yang mampu memotivasi dan atau memberikan

informasi kepada unit-unit kerja dalam organisasi, karena dengan motivasi dan informasinya tersebut dapat mendukung dan bahkan memberikan jaminan dilaksanakannya rencana maupun target organisasi yang ditentukan.

c. Berbagai faktor penunjang peran, fungsi, tugas, dan keberadaan Polri, antara lain :

- Faktor lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk berbagai tuntutan sosial untuk kelangsungan hidup kelembagaan, tingkat perkembangan teknologi, dan kemampuan lembaga untuk melakukan adaptasi sosial ;

- Faktor peran dan tugasnya yang diwujudkan dalam pelaksanaan kewajibannya dalam memberikan rasa tertib dan aman, dengan menjadikan etika, norma, persyaratan, maupun disiplin kerja sebagai self regulation dalam pelaksanaan peran dan tugasnya yang efisien dan efektif.

d. Pelaksanaan kerja Polri yang bersifat *proaktif preventif* dan bukan tertuju pada pekerjaan yang bersifat *reaktif-represif*, sehingga kapasitas kelembagaan tidak tertuju pada penugasan yang bersifat kuratif.

6. Kesimpulan dan Penutup.

Dari kajian di atas secara ringkas dapat disimpulkan, bahwa :

a. Pada prinsipnya pembinaan Polri secara ekologis harus dilakukan dengan memperhatikan situasi

dan kondisi lingkungannya, serta dalam pelaksanaannya menggunakan berbagai kiat untuk menciptakan sinergi, etos, dan kemampuan kerja yang efektif namun efisien ;

b. Pembinaan kemampuan Polri yang harus diarahkan pada tuntutan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara harus dilakukan secara selektif dan dengan prioritas, sehingga dalam realisasinya harus diarahkan pada pembinaan yang bertujuan untuk mewujudkan keunggulan kerja yang dibutuhkan oleh lingkungan dan atau masyarakatnya ;

c. Perlu dikembangkan sinergis dalam komuniti Polri atas dasar kepercayaan (*trust*), sehingga setiap proses kerja yang berlainan dan

berbagai inovasi yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas tidak diartikan sebagai aspek atau kecenderungan adanya perlawanan, tetapi dimungkinkan hal itu timbul karena pemanfaatan kelangkaan momentum dan atau kejenuhan dalam pekerjaan yang bersifat rutin ; dan

d. Sumberdaya manusia merupakan unsur *being* dan *having* dalam proses pembinaan kemampuan dan kesuksesan Polri.

Demikianlah kajian ini dibuat sebagai sumbangan pikiran dalam upaya pembinaan Polri, khususnya sehubungan dengan tuntutan dan kebutuhan dalam keberadaan, peran dan tugas, serta misi dan keberhasilannya.

ILMU KEPOLISIAN